



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Gorontalo

Nona Yusina^a, Gaffar^b, Sahmin Naholo^c

^{a,b,c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.

Email: nonayusina12@gmail.com^a, gaffar@ung.ac.id^b, sahminnoholo@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 01-11-2025

Revised 22-12-2025

Accepted 24-12-2025

Kata Kunci:

Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah,
Sistem Pengendalian
Internal, Kualitas
Laporan Keuangan,
Kota Gorontalo

Keywords:

Regional Government
Information System,
Internal Control System,
Financial Report
Quality, Gorontalo City

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah OPD di Kota Gorontalo, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui kuesioner dari 100 responden pada 25 OPD, Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan SPSS Statistics 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem Pengendalian Internal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan, SIPD dan SPI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Gorontalo. Hal ini menegaskan bahwa optimalisasi penggunaan SIPD serta penguatan pengendalian internal dapat meningkatkan keakuratan, keterandalan, dan transparansi penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the implementation of the Regional Government Information System and the Internal Control System on the quality of financial reports in Regional Apparatus Organizations (OPD) in Gorontalo City. This study used a quantitative approach. The study population was OPDs in Gorontalo City, while the sample was determined using a purposive sampling technique. Data were obtained through questionnaires from 100 respondents across 25 OPDs. The analysis technique used was multiple linear regression with SPSS Statistics 30. The results indicate that the Regional Government Information System has a positive and significant effect on the quality of financial reports. The Internal Control System also has a positive and significant effect on the quality of financial reports. Simultaneously, the SIPD and SPI significantly influence the quality of financial reports in OPDs in Gorontalo City. This confirms that optimizing the use of SIPD and strengthening internal controls can improve the accuracy, reliability, and transparency of local government financial reports.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mencapai tingkat kemajuan dan pertumbuhan yang pesat. Hampir seluruh sektor dalam suatu organisasi mengadopsi teknologi informasi sebagai penunjang kegiatan operasionalnya (Prayanti et al., 2020). Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk meningkatkan tingkat keandalan informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem yang dijalankan secara manual tanpa menggunakan teknologi sistem informasi.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang berkualitas dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penyajian suatu laporan dapat dibandingkan apabila informasi dalam laporan tersebut dapat menjadi pembandingan antara laporan keuangan saat ini dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan entitas lain pada umumnya yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama (Bale et al., 2023).

Sejalan dengan perbandingan internal dan eksternal sehingga laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, setiap bagian harus diisi oleh orang yang tepat (Siahaan, 2020). Begitu juga pada bagian keuangan yang harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan yang terkait lainnya. pemahaman akuntansi mempengaruhi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Putu et al., 2023). Selain pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif, dan efisien.

Penelitian (Nur Maulana & Sopanah, 2023) menunjukkan bahwa SPI memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siahaan & simanjuntak, 2020) yang menunjukkan bahwa Sistem pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dengan dikeluarkannya Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, seluruh SKPD Kota Gorontalo sudah tidak lagi menggunakan SIMDA, melainkan menggunakan SIPD (Sistem informasi Pemerintah Daerah). Aplikasi ini sudah terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan aplikasi bertujuan mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah khususnya Kota Gorontalo, namun dalam menjalankan program ini tidaklah mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat OPD Kota Gorontalo sendiri memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, termasuk anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan. Setiap tahun, Laporan Keuangan Pemerintah harus menjalani evaluasi dalam bentuk opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), OPD Kota Gorontalo ialah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 12 tahun berturut-turut. Opini Wajar Tanpa Pengecualian menunjukkan bahwa laporan keuangan suatu entitas disusun dengan baik, transparan, dan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Namun, meskipun SIPD diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan daerah, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi, terutama dalam sektor publik, tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh pemahaman dan penerimaan dari pengguna sistem tersebut.

Tabel 1. Opini LKPD Kota Gorontalo

Tahun Anggaran	Opini LKPD Kota Gorontalo	Keterangan
2019	WTP	Data publikasi data LHP LKPD 2019 menunjukkan kota gorontalo opini WTP
2020	WTP	Kota gorontalo juga memperoleh opini WTP
2021	WTP	Tahun 2021 LKPD kota gorontalo kembali mendapatkan opini WTP
2022	WTP	Kota gorontalo memperoleh opini WTP pada tahun 2022
2023	WTP	Opini WTP atas LKPD TA 2023 juga diberikan kota Gorontalo

Sumber: BPK Perwakilan Gorontalo, 2025

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang mengindikasikan belum optimalnya kualitas laporan keuangan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk di lingkungan Pemerintah Kota

Gorontalo. Hal ini tercermin dari temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berulang setiap tahun, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, serta kendala teknis dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh OPD. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih memerlukan penguatan, baik dari sisi sistem informasi maupun dari aspek pengendalian internal.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan penerapan sistem dengan hasil yang diharapkan. Dalam praktiknya, penerapan SIPD masih menghadapi berbagai kendala teknis, seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya pelatihan bagi pengguna, serta rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem. Di sisi lain, pelaksanaan SPI di lingkungan pemerintah daerah sering kali belum mampu mendeteksi dan mencegah kesalahan maupun kecurangan secara efektif karena lemahnya fungsi pengawasan internal serta kurangnya komitmen manajemen dalam implementasinya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting, yakni mengapa penerapan sistem informasi dan pengendalian internal yang dirancang untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan justru belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya hubungan antara SIPD, SPI, dan kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Stakholder Theory

Teori Stakeholder menjelaskan bahwa setiap organisasi, termasuk pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada satu pihak seperti pimpinan atau pemerintah pusat, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan atau dipengaruhi oleh aktivitas organisasi tersebut. Freeman (1984) mendefinisikan stakeholder sebagai individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi, sehingga pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan pelaporan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan suatu program aplikasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengelola daerah melalui analisis dan profil pembangunan daerah sebagai dasar pertimbangan investasi.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan suatu program aplikasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan.

Kualitas laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan tanggung jawab penyusunnya, dimana lembaga keuangan mikro lokal menyusunnya sesuai siklus akuntansi, mencakup tahap identifikasi dokumen, entri jurnal, dan periode akuntansi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan situasi keuangan dan transaksi yang dilakukan, dengan tujuan menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat jika disusun melalui siklus akuntansi yang sesuai di lingkungan pemerintah daerah. (Rosiana Anjali et al., 2024). Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang disusun oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan daerah yang berkualitas harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kualitas yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. (Zulfikar & Aripin, 2021).

Hipotesis

Melihat fenomena, teori dan kerangka konseptual yang telah disajikan maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

- H1: Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
- H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- H3: Penerapan sistem Informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Gorontalo mengenai Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan pengaruh

antara satu variabel dengan variabel lainnya. Populasi penelitian ini berjumlah 1.101 yang merupakan aparatur sipil negara yang bekerja pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Gorontalo. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Purposive sampling*, yaitu Pimpinan/Pejabat, Kepala Bagian, Kepala Tata Usaha, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bendahara, sehingga diperoleh adalah 100 Sampel. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuisisioner dengan tahapan analisis yaitu uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas), dan uji regresi linier berganda menggunakan bantuan SPSS.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Nilai r-hitung	Nilai r-tabel	Keterangan
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X1)	X1.1	0,544	0,196	Valid
	X1.2	0,488	0,196	Valid
	X1.3	0,557	0,196	Valid
	X1.4	0,417	0,196	Valid
	X1.5	0,414	0,196	Valid
	X1.6	0,499	0,196	Valid
	X1.7	0,404	0,196	Valid
	X1.8	0,642	0,196	Valid
	X1.9	0,559	0,196	Valid
	X1.10	0,332	0,196	Valid
	X1.11	0,458	0,196	Valid
	X1.12	0,402	0,196	Valid
	X1.13	0,521	0,196	Valid
	X1.14	0,483	0,196	Valid
	X1.15	0,546	0,196	Valid
	X1.16	0,483	0,196	Valid
	X1.17	0,635	0,196	Valid
	X1.18	0,476	0,196	Valid
Sistem pengendalian Intern (X2)	X2.1	0,674	0,196	Valid
	X2.2	0,518	0,196	Valid
	X2.3	0,406	0,196	Valid
	X2.4	0,550	0,196	Valid
	X2.5	0,321	0,196	Valid
	X2.6	0,492	0,196	Valid
	X2.7	0,443	0,196	Valid
	X2.8	0,465	0,196	Valid
	X2.9	0,462	0,196	Valid
	X2.10	0,629	0,196	Valid
	X2.11	0,608	0,196	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y.1	0,515	0,196	Valid
	Y.2	0,544	0,196	Valid

Y.3	0,459	0,196	Valid
Y.4	0,723	0,196	Valid
Y.5	0,548	0,196	Valid
Y.6	0,512	0,196	Valid
Y.7	0,589	0,196	Valid
Y.8	0,528	0,196	Valid
Y.9	0,563	0,196	Valid
Y.10	0,691	0,196	Valid
Y.11	0,542	0,196	Valid
Y.12	0,645	0,196	Valid
Y.13	0,522	0,196	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS 30, 2025

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji validitas dengan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* dan nilai r-tabel sebesar 0,1966, diperoleh bahwa seluruh item pernyataan pada variabel yang diteliti nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel, sehingga dapat disimpulkan dinyatakan valid dan layak digunakan.

Uji Reabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha Toleransi	Keterangan
1.	SIPD (X1)	0,673	0,6	Reliabel
2.	Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,708	0,6	Reliabel
3.	Kualitas Laporan Keuangna (Y)	0,641	0,6	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS 30, 2025

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji reabilitas yang dilakukan terhadap seluruh item pernyataan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh lebih besar dari 0,6 sehingga semua variabel dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya (handal) untuk digunakan sebagai alat ukur.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		5669.1277362
Most Extreme Differences	Absolute		.084
	Positive		.084
	Negative		-.049
Test Statistic			.084
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.081
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.084
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.076
		Upper Bound	.091

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS 30

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Asymp. Sig. (2 tailed) sebesar 0,081. Nilai yang diperoleh lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	-3328.299	4463.809		-.746	.458		
	SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	.355	.086	.397	4.110	<.001	.546	1.832
	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	.651	.165	.381	3.939	<.001	.546	1.832

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS 30

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Tolerance untuk variabel Sistem Informasi Pemerintah daerah yakni sebesar 0,546, Sistem Pengendalian 0,546. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas (independent) memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,10 yang berarti tidak korelasi antar variabel pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan 106 Sistem Pengendalian Internal, sehingga dalam model regresi ini baik. Sedangkan nilai VIF pada Sistem Informasi Pemerintah daerah Sebesar 1,832, Sistem Pengendalian Internal sebesar 1,832 menunjukkan bahwa variabel pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (independent) memiliki nilai VIF < 10 sehingga dalam model regresi ini baik dan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterosketastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3262.963	3056.108		1.068	.288
	Sistem Informasi pemerintah Daerah	-.018	.059	-.043	-.312	.756
	Sistem Pengendalian Internal	.055	.113	.067	.485	.629

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS 30

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh bahwa nilai signifikansi untuk variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X1) sebesar 0,756 > 0,05, dan Variabel Sistem

Pengendalian Internal Sebesar $0,629 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak memiliki gejala Heterokedasitas.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3328.299	4463.809		-.746	.458
	Sistem Informasi Pemerintah Daerah	.355	.086	.397	4.110	<.001
	Sistem Pengendalian Internal	.651	.165	.381	3.939	<.001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keputusan

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS 30

Dari hasil analisis Pada tabel diatas maka persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini Adalah :

$$Y = -3328,299 + 0,355 X1 + 0,651 X2 + \epsilon$$

1. Nilai konstantan bernilai sebesar -3328,299. Nilai tersebut memiliki arti bahwa jika semua variabel independent yang terdiri dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X1), dan Sistem Pengendalian Internal (X2) diasumsikan nol, maka nilai dari variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan (Y) Adalah sebesar -3328,299.
2. Nilai koefisien regresi variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X1) bernilai positif sebesar 0,355. Hal ini berarti apabila variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah meningkat dan variabel lain tetap atau constant maka akan menyebabkan meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan senilai 0,355
3. Nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) bernilai positif sebesar 0,651. Hal ini berarti apabila variabel Sistem Pengendalian Internal meningkat dan variabel lain tetap constant maka akan menyebabkan meningkatnya kualitas laporan keuangan senilai 0,651.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (t)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 diatas maka hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Hasil uji t Sistem Informasi Pemerintah Daerah di peroleh nilai t_{hitung} sebesar 4,110 dan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Hasil uji t variabel Sistem Pengendalian Internal di peroleh nilai t_{hitung} sebesar 3,939 dan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Uji Simultan (F)

Tabel 8. Hasil uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3259201355.9	2	1629600678.0	49.680	<.001 ^b
	Residual	3181761919.7	97	32801669.275		
	Total	6440963275.6	99			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keputusan

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS 30

Dari tabel diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 49,680 dan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.711 ^a	.506	.496	5727.27416

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS 30

Berdasarkan hasil uji statistic, diperoleh nilai koefisien determinan (*R Square*) sebesar 0,496 atau setara 49,6%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) secara Bersama-sama memberikan kontribusi terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) Sebesar 49,6%. Sedangkan sisanya sebesar 50,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena sistem informasi yang terintegrasi dan dikelola dengan baik dapat membantu pemerintah daerah dalam proses pencatatan, pengolahan, serta penyajian data keuangan secara lebih akurat dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori *Stakeholder*, yang menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Penerapan SIPD memungkinkan pemerintah daerah mengurangi kesalahan informasi, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan memenuhi kebutuhan para stakeholder. Dengan adanya sistem informasi yang handal, pemerintah dapat mengurangi ketidakpastian informasi, meningkatkan akuntabilitas publik, serta memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo. Hal ini menekankan bahwa pemerintah daerah, agar laporan keuangan lebih Transparan, akurat, dan akuntabel. Sejalan dengan penelitian (Rosiana Anjani et al., 2024) yang menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengaruh signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini di dukung oleh (Solikhin Agus, Fitriani Lidya, 2024) yang menemukan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. SPI berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil analisis, beberapa faktor utama ditemukan memiliki kontribusi kuat terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang baik, konsisten, dan terintegrasi memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Otorisasi yang tepat, kepemimpinan yang berintegritas, keterbukaan informasi, sistem informasi akuntansi yang andal, serta evaluasi internal yang berkelanjutan merupakan elemen-elemen kunci yang saling mendukung dalam mewujudkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin efektif pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dalam seluruh komponennya, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya penguatan SPI sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip *Good Governance*.

Dengan demikian, hasil penelitian ini selaras dengan prinsip Teori Stakeholder yang menekankan bahwa pengendalian internal yang efektif merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada para stakeholder. SPI berfungsi memastikan bahwa pemerintah tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu memberikan laporan keuangan yang sesuai kebutuhan stakeholder, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Bale & Muanas, M. 2023). Menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini juga didukung oleh peneliti (Nur Mawar Maulana et al., 2023) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal mempunyai Pengaruh Yang Positif dan Signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo.

Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi yang baik serta sistem pengendalian internal yang efektif secara simultan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sistem informasi membantu penyajian data keuangan secara cepat, tepat, dan akurat, sedangkan sistem pengendalian internal memastikan keandalan dan kejujuran data yang dihasilkan. Kombinasi keduanya memperkuat proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo.

Dalam perspektif Teori *Stakeholder*, temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan (stakeholders). Teori Stakeholder menekankan bahwa organisasi publik wajib menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penerapan SIPD dan SPI secara simultan menjadi mekanisme penting untuk memenuhi tuntutan tersebut. SIPD menyediakan akses data keuangan yang transparan dan real-time, sehingga menjawab kebutuhan stakeholder akan informasi yang cepat dan dapat dipercaya. Sementara itu, SPI memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan dilaksanakan secara tertib, patuh regulasi, dan bebas dari kesalahan material, sehingga kualitas laporan keuangan yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dan & Sudrajat, 2024) menyatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini juga didukung oleh oleh penelitian (Firmansyah, 2024) menyatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo.
2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo.
3. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah daerah Dan Sistem Pengendalian Internal secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti hanya dibatasi pada penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Internal, sementara masih terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti kompetensi sumber daya manusia, komitmen

pimpinan, budaya organisasi, serta dukungan teknologi informasi, yang belum dianalisis dalam penelitian ini.

Saran

1. Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo disarankan untuk:
 - a) Memiliki rencana tindak lanjut yang jelas apabila terjadi kendala dalam pengoperasian SIPD. Hal ini penting agar setiap hambatan teknis dapat segera diatasi tanpa mengganggu proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas perangkat lunak dan infrastruktur teknologi informasi, seperti memperkuat koneksi jaringan internet dan melakukan pembaruan sistem secara berkala. Upaya ini akan membantu memperlancar proses pelaporan keuangan melalui SIPD serta meningkatkan efisiensi kerja pegawai.
 - b) Terus memperbaiki dan memperkuat pembagian tugas serta wewenang di lingkungan kerja agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Selain itu, penting bagi setiap unit kerja untuk merancang dan menerapkan tindakan pencegahan risiko secara sistematis, termasuk melakukan penilaian risiko secara rutin yang dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Dengan sistem pengendalian internal yang kuat, maka tingkat keandalan dan akurasi laporan keuangan akan semakin meningkat.
2. Peneliti ini hanya mengkaji Variabel Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, atau komitmen organisasi guna memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Peneliti juga dapat memperluas pada objek atau wilayah lain agar diperoleh perbandingan antar instansi dan Gambaran umum secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, N. A. R., Gunardi, G., Sudrajat, A., & Framesthi, D. B. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Cicalengka. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 18(1), April 2024. Universitas Nurtanio. <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia>
- Bale, P. J., Marlina, T., & Muanas, M. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 3(2).

- Firmansyah, T. wahyudi. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. *Jumia*, 1–23.
- Fitriani, L., & Solikhin, A. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi Oleh Teknologi Informasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(05), 1548–1561. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i05.32328>
- Gaffar, M. I., & Alhabsyi, D. T. S., & Gaffar, M. I. (2024). *Determinan Kinerja Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017–2022*. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2234–2251. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.357>
- Hartati, S. (2023). *Implementasi SIPD ditinjau dari Struktur Organisasi, Kebijakan Manajemen, Infrastruktur Teknologi, dan Pelatihan SDM*. *Jurnal Sistem Informasi Sektor Publik*, 5(2), 101–118.
- Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 66–76
- Nur, M. M., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(1), 48–58. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.05>
- Nurwani, M. I. N. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Prayanthi, I., Lompoliu, E., & Langkedeng, R. D. (2020). *The effect of system quality, information quality and perceived usefulness on accounting information system user satisfaction*. *Klabat Accounting Review*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.60090/kar.v1i2.475.1-11>
- Putu, N., Hermayani, S., Wayan, N., & Dewi, Y. (2023). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Fungsi Pengawasan, Good Corporate Governance, dan Tekanan Eksternal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD se- Kota Denpasar*. 14.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu). *Jurnal Manajemen*, 6(2), 129–138.